

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	2024		
Periode yang dinilai	Periode RPJMD Tahun 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
OPD yang Dinilai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Sumber Data	Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2021-2026		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Pengendalian Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		
Sasaran Strategis	1. Berkurangnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban 2. Optimalnya Upaya Penanganan Kriminalitas		
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target
	1	Persentase pemantapan pelaksanaan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%
	2	Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dalam pengembangan etika serta budaya politik	75%
	3	Persentase jumlah Ormas yang terdaftar dan aktif	69%
	4	Persentase penurunan konflik sosial	80%
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: Meningkatkan Pengendalian Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Sasaran Strategis: Berkurangnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban IKU Strategis: Persentase pemantapan pelaksanaan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Program - Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik - Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		



PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	: 2024		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
OPD yang Dinilai	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Sumber Data	Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2021-2026		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Pengendalian Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		
Sasaran Strategis	<p>1. Berkurangnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban</p> <p>2. Optimalnya Upaya Penanganan Kriminalitas</p>		
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target
	1	Persentase pemantapan pelaksanaan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%
	2	Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dalam pengembangan etika serta budaya politik	75%
	3	Persentase jumlah Ormas yang terdaftar dan aktif	69%
	4	Persentase penurunan konflik sosial	80%
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Tujuan strategis: Meningkatkan Pengendalian Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</p> <p>Sasaran Strategis: Berkurangnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban</p> <p>IKU Strategis: Persentase penurunan konflik sosial</p> <p>Program : - Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</p>		



Denpasar, 5 Januari 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Denpasar,Anak Agung Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, S.E.Pembina Tingkat I
NIP. 19720313 199603 1 002

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	: 2024		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
OPD yang Dinilai	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Sumber Data	Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2024		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Pengendalian Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		
Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Renja 2022) dan Kegiatan Utama	<p>1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</p> <p>2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</p> <p>3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</p>		
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Persentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100%
	2	Persentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	75%
	3	Persentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	69%
	4	Persentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	80%
Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program : Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</p> <p>Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa</p>		



PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	: 2024		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
OPD yang Dinilai	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Sumber Data	Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2024		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Pengendalian Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		
Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Renja 2022) dan Kegiatan Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik 3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik 		
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Persentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100%
	2	Persentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	75%
	3	Persentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	69%
	4	Persentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	80%
Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program : Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</p> <p>Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</p>		



PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	: 2024		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
OPD yang Dinilai	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Sumber Data	Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2024		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Pengendalian Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		
Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Renja 2022) dan Kegiatan Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta 3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik 		
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Percentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100%
	2	Percentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	75%
	3	Percentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	69%
	4	Percentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	80%
Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program : Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Keluaran/Hasil Kegiatan : Percentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		



Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD

<p>Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Penilaian : 2024 Periode yang dinilai : Periode RENSTRA Tahun 2021-2026 Tujuan Strategis : Meningkatkan Pengendalian Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</p>											
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian	Risiko		Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Dampak	
				Kode	Risiko					Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Tujuan: Meningkatkan Pengendalian Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat										
	Sasaran: Berkurangnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban	Persentase pemantapan pelaksanaan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kurangnya pemahaman masyarakat Kota Denpasar terkait Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	RSO.24.40.34.01	Kepala Badan Kesbangpol	Kurangnya sosialisasi seperti webinar atau FGD terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Internal	C	Tidak terjaganya nilai-nilai Ideologi Pancasila di masyarakat	Masyarakat	
		Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dalam pengembangan etika serta budaya politik	Kurangnya pemberdayaan kepada partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan di Kota Denpasar	RSO.24.40.34.02	Kepala Badan Kesbangpol	Kurang maksimalnya penggunaan anggaran oleh pihak partai politik	Internal dan eksternal	C	Penggunaan anggaran dari bantuan keuangan partai politik masih kurang menyasar tentang pendidikan politik pada	Partai politik Masyarakat	
		Persentase jumlah Ormas yang terdaftar dan aktif	Kurangnya pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Denpasar	RSO.24.40.34.03	Kepala Badan Kesbangpol	Kurangnya pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan	Internal	C	Kurang terbinanya dan terawasinya Ormas yang ada di Kota Denpasar	Organisasi Kemasyarakatan Masyarakat	
2	Tujuan: Meningkatkan Pengendalian Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat										
	Sasaran: Optimalnya Upaya Penanganan Kriminalitas	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Masih terjadinya kasus konflik sosial di Kota Denpasar	RSO.24.40.34.04	Kepala Badan Kesbangpol	Masih kurangnya peran Badan Kesbangpol didalam melakukan tindakan preventive terkait konflik sosial dari indikator IPOLEKSOSBUDHANKAM	Internal	C	Terjadinya kondisi keamanan yang kurang kondusif	Masyarakat	



FORMULIR KERTAS KERJA
IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL OPD

<p>Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali</p> <p>Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>Tahun Penilaian : 2024</p> <p>Periode yang dinilai : 1 Juli 2021 - 28 April 2022</p> <p>Tujuan Strategis : Meningkatkan Pengendalian Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</p> <p>Sasaran strategis OPD : 1. Berkurangnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban 2. Optimalnya Upaya Penanganan Kriminalitas</p> <p>Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</p>																			
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)									
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l								
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Percentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Penatausahaan	Pelaksanaan adminstrasi tidak tepat waktu	ROO.24.40.34.01	Kepala Badan Kesbangpol	Berkas dokumentasi SPJ terlambat	Internal	C	terlambatnya pembayaran SPJ kegiatan	BKBP								
			Pelaksanaan	Jumlah siswa yang mendaftar seleksi Paskibraka dibawah target	ROO.24.40.34.02	Kepala Badan Kesbangpol	Kurangnya koordinasi antara Panitia dari Purna Paskibraka Indonesia Kota Denpasar dengan Badan Kesbangpol Kota Denpasar	Internal	C	Tidak tercapainya target dari siswa yang mendaftar terkait seleksi Paskibraka di Kota Denpasar	BKBP								
2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Percentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pemantauan dan Evaluasi	Kurangnya pemberdayaan kepada partai politik	ROO.24.40.34.03	Kepala Badan Kesbangpol	Kurang terarahnya penggunaan anggaran oleh pihak partai politik, untuk pendidikan politik di masyarakat	Internal	C	Penggunaan anggaran kurang tepat sasaran	BKBP								
										Pertanggungjawaban		Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.24.40.34.04	Kepala Badan Kesbangpol	Tidak Lengkapnya Dokumen yang diminta pada saat Pelaksanaan Verifikasi	Ekstema I	C	Mundurnya jadwal pelaksanaan kegiatan pelaksanaan verifikasi	BKBP
										Penatausahaan		Pelaksanaan adminstrasi tidak tepat waktu	ROO.24.40.34.05	Kepala Badan Kesbangpol	Berkas dokumentasi SPJ terlambat	Internal	C	terlambatnya pembayaran SPJ kegiatan	BKBP
	Pelaksanaan	Tidak Lengkapnya Dokumen yang diminta	ROO.24.40.34.06	Kepala Badan Kesbangpol	Kurang tertib nya partai politik terkait berkas-berkas yang menyangkut penggunaan anggaran	Internal	C	Tujuan verifikasi dan pengawasan partai politik tidak bisa dilaksanakan	BKBP										

			Pelaporan	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah di jadwalkan	ROO.24.40.34.07	Kepala Badan Kesbangpol	Berkas Administrasi SPJ pelaporan Keuangan tidak lengkap	Internal	C	tidak tercapai nya serapan target realisasi anggaran	BKBP
3	Perumusan Ketijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban kurang maksimal	ROO.24.40.34.08	Kepala Badan Kesbangpol	Kurang terberdayakannya ormas yang ada di kota Denpasar	Ekstema I	C	Terjadinya benturan kepentingan antar ormas yang ada di Kota Denpasar	BKBP
			Penatausahaan	Pelaksanaan adminitrasi tidak tepat waktu	ROO.24.40.34.09	Kepala Badan Kesbangpol	Berkas dokumentasi SPJ terlambat	Internal	C	terlambatnya pembayaran SPJ kegiatan	BKBP
			Pelaksanaan	Masih banyak Ormas yang belum terdaftar dan terawasi oleh Badan Kesbangpol	ROO.24.40.34.10	Kepala Badan Kesbangpol	Banyak Ormas ataupun masyarakat yang kurang mengetahui apa itu Badan Kesbangpol maupun tupoksinya	Internal	C	Banyak Ormas yang Badan Kesbangpol tidak dapat awasi kegiatannya	BKBP
			Pelaporan	Masih banyak Ormas yang enggan melaporkan organisasinya kepada Badan Kesbangpol	ROO.24.40.34.11	Kepala Badan Kesbangpol	Banyak Ormas ataupun masyarakat yang kurang mengetahui apa itu Badan Kesbangpol maupun tupoksinya	Internal	C	Banyak Ormas yang Badan Kesbangpol tidak dapat awasi kegiatannya	BKBP
4	Perumusan Ketijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban terkait kegiatan Deteksi Dini kurang maksimal	ROO.24.40.34.12	Kepala Badan Kesbangpol	Kurangnya kegiatan forum-forum maupun deteksi dini terkait Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Ekstema I	C	Banyak konflik sosial yang terjadi di masyarakat yang seharusnya dapat dicegah	BKBP
			Pelaporan	Pelaporan terkait deteksi dini di masyarakat kurang maksimal	ROO.24.40.34.13	Kepala Badan Kesbangpol	Kurang terlaksananya kegiatan forum-forum maupun deteksi dini terkait Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Internal	C	Pelaporan terkait deteksi dini masyarakat yang seharusnya diketahui Walikota, menjadi kurang maskimal	BKBP



**Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko**

Nama Pemda Tahun Penilaian		: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali : 2024			
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Pengendalian Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat			
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I Risiko Strategis Pemda					
1					
2					
II Risiko Strategis OPD					
Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar					
1	Kurangnya pemahaman masyarakat Kota Denpasar terkait Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	RSO.24.40.34 .01	1	1	1
2	Kurangnya pemberdayaan kepada partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan di Kota Denpasar	RSO.24.40.34 .02	1	1	1
3	Kurangnya pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Denpasar	RSO.24.40.34 .03	1	1	1
4	Masih terjadinya kasus konflik sosial di Kota Denpasar	RSO.24.40.34 .04	1	1	1
III Risiko Operasional OPD					
Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar					
1	Pelaksanaan adminitrasi tidak tepat waktu	ROO.24.40.34 .01	1	4	4
2	Jumlah siswa yang mendaftar seleksi Paskibraka dibawah target	ROO.24.40.34 .02	1	3	3
3	Kurangnya pemberdayaan kepada partai politik	ROO.24.40.34 .03	2	3	6
4	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.24.40.34 .04	1	4	4
5	Pelaksanaan adminitrasi tidak tepat waktu	ROO.24.40.34 .05	1	4	4
6	Tidak Lengkapnya Dokumen yang diminta	ROO.24.40.34 .06	1	4	4
7	Pelaporan realisasi Keuangan tidak sesuai dengan yang telah dijadwalkan	ROO.24.40.34 .07	1	3	3
8	Pertanggungjawaban kurang maksimal	ROO.24.40.34 .08	1	3	3
9	Pelaksanaan adminitrasi tidak tepat waktu	ROO.24.40.34 .09	1	4	4
10	Masih banyak Ormas yang belum terdaftar dan terawasi oleh Badan Kesbangpol	ROO.24.40.34 .10	2	4	8
11	Masih banyak Ormas yang enggan melaporkan organisasinya kepada Badan Kesbangpol	ROO.24.40.34 .11	1	4	4
12	Pertanggungjawaban terkait kegiatan Deteksi Dini kurang maksimal	ROO.24.40.34 .12	1	3	3
13	Pelaporan terkait deteksi dini di masyarakat kurang maksimal	ROO.24.40.34 .13	3	3	9



**Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali Tahun Penilaian : 2024 Tujuan Strategis : Meningkatkan Pengendalian Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
No	Risiko Prioritas	Kode	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis Pemda						
1						
II Risiko Strategis OPD						
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
1	Masih terjadinya kasus konflik sosial di Kota Denpasar	RSO.24.4 0.34.04	1	Kepala Badan Kesbangpol	Masih kurangnya peran Badan Kesbangpol didalam melakukan tindakan preventive terkait konflik sosial dari indikator IPOLEKSOSBUDHANKAM	Terjadinya kondisi keamanan yang kurang kondusif
III Risiko Operasional OPD						
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
1	Pelaporan terkait deteksi dini di masyarakat kurang maksimal	ROO.24.4 0.34.13	9	Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	Kurang terlaksananya kegiatan forum-forum maupun deteksi dini terkait Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaporan terkait deteksi dini masyarakat yang seharusnya diketahui Walikota, menjadi kurang maksimal



Formulir Kertas Kerja

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali Tahun Penilaian : 2024 Tujuan Strategis : Meningkatkan Pengendalian Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Pemda						
1							
II	Risiko Strategis OPD						
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
1	Masih terjadinya kasus konflik sosial di Kota Denpasar	RSO.24.40.34.04	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah	Masih di fokusannya anggaran daerah untuk penanganan Covid-19, mengakibatkan anggaran untuk pelaksanaan FKDM di Kota Denpasar tidak terlaksana	Melaksanakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Kepala Badan Kesbangpol	Triwulan III & IV 2024
III	Risiko Operasional						
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
1	Pelaporan terkait deteksi dini di masyarakat kurang maksimal	ROO.24.40.34.13	Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah	- Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 & 50 masih kurangnya wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk penindakan terhadap WNA yang ada di daerah - Kurangnya pelaporan dari penjamin WNA terkait kepada kepala Desa atau kelian setempat - Kurangnya keterbukaan akses data terkait WNA dari Imigrasi	- Melakukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sehingga Walikota dapat mengetahui informasi apapun terkait deteksi dini maupun konflik sosial yang ada di Kota Denpasar - Pengawasan terhadap Warga Negara Asing di Kota Denpasar - Membuat aplikasi pelaporan terkait keberadaan WNA yang ada di daerah	Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	Triwulan III & IV 2024



Denpasar, 5 Januari 2024
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kota Denpasar,
 Anak Agung Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, S.E.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19720313 199603 1 002

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali 2024 Meningkatkan Pengendalian Terhadap Keamanan dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
No a	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan b	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian c	Penyedia Informasi d	Penerima Informasi e	Rencana Waktu Pelaksanaan f	Realisasi Waktu Pelaksanaan g	Keterangan h
I	Risiko Strategis						
1							
II	Risiko Strategis OPD						
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
1	Melaksanakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Rapat/Koordinasi	Badan Kesbangpol	Anggota FKDM Kota Denpasar	Triwulan III & IV 2024	Juli-Desember 2024	
III	Risiko Operasional						
	Nama OPD: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
1	- Melakukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sehingga Walikota dapat mengetahui informasi apapun terkait deteksi dini maupun konflik sosial yang ada di Kota Denpasar - dan Pengawasan terhadap Warga Negara Asing di Kota Denpasar - Membuat aplikasi pelaporan terkait keberadaan WNA yang ada di daerah	Koordinasi/Rapat	Badan Kesbangpol	Lembaga Vertikal lain seperti TNI,POLRI,BIN,Kejaksaan Tinggi, Imigrasi dan stakeholder lain yang terkait yang ada di Kota Denpasar	Triwulan III & IV 2024	Juli-Desember 2024	



Denpasar, 5 Januari 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Denpasar,

Anak Agung Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, S.E.

Pembina Tingkat I

NIR: 19720313 199603 1 002

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali Tahun Penilaian : 2024 Tujuan Strategis : Meningkatkan Pengendalian Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Melaksanakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Rapat/Koordinasi	Kepala Badan Kesbangpol	Triwulan III & IV 2024	Juli-Desember 2024	
2	- Melakukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sehingga Walikota dapat mengetahui informasi apapun terkait deteksi dini maupun konflik sosial yang ada di Kota Denpasar - dan Pengawasan terhadap Warga Negara Asing di Kota Denpasar - Membuat aplikasi pelaporan terkait keberadaan WNA yang ada di daerah	Koordinasi/Rapat	Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	Triwulan III & IV 2024	Juli-Desember 2024	



Denpasar, 5 Januari 2024
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kota Denpasar,
Anak Agung Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, S.E.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19720313 199603 1 002

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda		Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali							
Tahun Penilaian		2024							
Tujuan Strategis		Meningkatkan Pengendalian Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat							
Urusan Pemerintahan		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Keteritorialan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			RTP	Rencana Pelaksanaan	Realisasi Pelaksanaan	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak				
I	Risiko Strategis Pemda								
	1								
II	Risiko Strategis OPD								
	1 Melaksanakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	RSO.24.40.34.04	Masih kurangnya peran Badan Kesbangpol didalam melakukan tindakan preventive terkait konflik sosial dari indikator IPOLEKSOSBUDHA NKAM	Terjadinya kondisi keamanan yang kurang kondusif		Melaksanakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Triwulan III & IV 2024	Juli-Desember 2024	Belum dilaksanakan, efektifitas RTP belum dapat diukur
III	Risiko Operasional OPD								
	1 - Melakukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sehingga Walikota dapat mengetahui informasi apapun terkait deteksi dini maupun konflik sosial yang ada di Kota Denpasar - dan Pengawasan terhadap Warga Negara Asing di Kota Denpasar - Membuat aplikasi pelaporan terkait keberadaan WNA yang ada di daerah	ROO.24.40.34.13	Kurang terlaksananya kegiatan forum-forum maupun deteksi dini terkait Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaporan terkait deteksi dini masyarakat yang seharusnya diketahui Walikota, menjadi kurang maskimal	- Melakukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sehingga Walikota dapat mengetahui informasi apapun terkait deteksi dini maupun konflik sosial yang ada di Kota Denpasar - dan Pengawasan terhadap Warga Negara Asing di Kota Denpasar - Membuat aplikasi pelaporan terkait keberadaan WNA yang ada di daerah	Triwulan III & IV 2024	Juli-Desember 2024	Belum dilaksanakan, efektifitas RTP belum dapat diukur	

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan



Denpasar, 5 Januari 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Denpasar,

Anak Agung Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, S.E.

Pembina Tingkat I

NIP. 19720313 199603 1 002